



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon**



Jalan Sunan Muria Nomor 100 Sumber Kabupaten Cirebon

Telp/Fax. (0231) 320816

Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id>



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 56 -BKPSDM/2025
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 56 -BKPSDM/2025

TANGGAL : 17 Februari 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
- Ketua Tim : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
- Sekretaris Tim : Perencana selaku Ketua Tim Kerja Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kelompok Kerja : a. Sekretariat :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada
Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
 4. Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
 5. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada
Subbagian Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
 6. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana pada
Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
 7. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Analis Kepegawaian selaku Ketua Tim Kerja
Pengadaan dan Pemberhentian pada Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
 3. Analis Kepegawaian selaku Ketua Tim Kerja Data

- dan Informasi pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Analis Kepegawaian selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Profesi ASN pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 6. Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan :
1. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Analis Kepegawaian selaku Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Analis Kepegawaian selaku Ketua Tim Kerja Kepangkatan pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Analis Pengembangan Karir pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan :
1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Analis Kepegawaian selaku Ketua Tim Kerja Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Analis Kepegawaian selaku Ketua Tim Kerja Disiplin dan Penghargaan pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Analis Kinerja pada Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

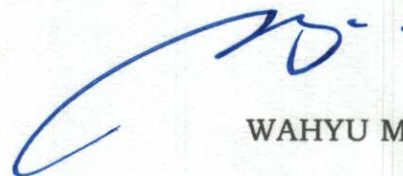
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,



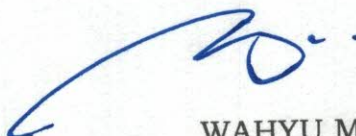
WAHYU MIJAYA

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

5. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai pada Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur :
1. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Analis Pengembangan Kompetensi selaku Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan dan Sertifikasi pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Analis Pengembangan Kompetensi selaku Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kompetensi pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Analis Program Diklat pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah karena atas ijin-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dapat kami susun. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renja disusun dalam waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RENSTRA BKPSDM Kabupaten Cirebon dan mengacu pada RKPD yang telah disahkan. Dokumen Renja menjabarkan tentang tujuan, sasaran, target program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Semoga dokumen Renja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Masukan mengenai penyempurnaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 sangat diharapkan agar kinerja Perangkat Daerah ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sumber, 28 Februari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 198803 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan hukum.....	2
1.3 Maksud dan tujuan	3
1.4 Sistematika penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kab. Cirebon Tahun 2024 & capaian Renstra BKPSDM Kab. Cirebon.....	7
2.2 Analisis kinerja pelayanan BKPSDM Kab. Cirebon	23
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kab. Cirebon	24
2.4 Review Rancangan awal RKP.....	26
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kab. Cirebon.....	47
3.3 Program dan kegiatan	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	52
4.1 Rencana kerja dan pendanaan BKPSDM Kab. Cirebon	52
BAB V PENUTUP	62
5.1 Catatan Penting	62
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	62
5.3 Rencana Tindak Lanjut	63

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Cirebon Tahun 2024	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sampai dengan Tahun 2024	23
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	28
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Makro Tahun 2026	47
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon	48
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	54

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Cirebon, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 mendasarkan pada peraturan yang terkait, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E.4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 153 Tahun 2023).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon secara

berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BKPSDM tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

a. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

b. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

c. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

d. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kab. Cirebon Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Kab. Cirebon.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon melaksanakan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 24.086.761.300,- (dua puluh empat milyar delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 23.237.974.012,- (dua puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah) atau sebesar 96,48 persen.

Pelaksanaan program-program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Kepegawaian Daerah

Indikator program yang pertama pada program kepegawaian daerah adalah nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN pada penerapan sistem merit pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi. Target program pada tahun 2024 adalah 82 poin, realisasi program sebesar 82 poin, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 966.006.000,- terealisasi sebesar Rp 856.998.614,- atau sebesar 88,72 persen.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu :

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan realisasi sebesar Rp 966.006.000,- dari anggaran Rp 856.998.614,- atau terserap 88,72 persen, yang terdiri dari 5 Subkegiatan, yaitu :

- a. Subkegiatan Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 539.665.700,- dengan realisasi sebesar Rp 490.899.814,- atau terserap 90,96 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 196.019.900,- dengan realisasi sebesar Rp 172.139.500,- atau terserap 87,82 persen.
- c. Subkegiatan Pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 114 563 600,- dengan realisasi sebesar Rp 102.303.000,- atau terserap 89,30 persen.
- d. Subkegiatan Pengelolaan data Kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 23.377.900,- dengan realisasi sebesar Rp 8.084.400,- atau terserap 34,58 persen.
- e. Subkegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 92.378.900,- dengan realisasi sebesar Rp 83.571.900,- atau terserap 90,47 persen.

Indikator program yang kedua pada program kepegawaian daerah adalah nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, Program ini dilaksanakan oleh 2 Bidang yaitu Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan dan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. Target program pada tahun 2024 adalah 123 poin, realisasi program sebesar 95 poin, dan capaian kinerja program sebesar 77,24 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.089.530.800,-

terrealisasi sebesar Rp 4.039.772.282,- atau sebesar 98,78 persen.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**, dengan realisasi sebesar Rp 604.817.800,- dari anggaran Rp 599.004.530,- atau terserap 99,04 persen, yang terdiri dari 3 subkegiatan, yaitu :
 - a. Subkegiatan Pengelolaan mutasi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 205.468.000,- dengan realisasi sebesar Rp 205.071.700,- atau terserap 99,81 persen.
 - b. Subkegiatan Pengelolaan kenaikan pangkat ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 162.123.100,- dengan realisasi sebesar Rp 161.622.500,- atau terserap 99,69 persen.
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 237.226.700,- dengan realisasi sebesar Rp 232.310.330,- atau terserap 97,93 persen.

- 2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**, dengan realisasi sebesar Rp 534.416.952,- dari anggaran Rp 543.343.900,- atau terserap 98,36 persen, yang terdiri dari 6 subkegiatan, yaitu :
 - a. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 207.325.000,- dengan realisasi sebesar Rp 206.218.500,- atau terserap 99,47 persen.
 - b. Subkegiatan Pengelolaan Assesment Center. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 138.239.500,- dengan realisasi sebesar Rp 137.679.000,- atau terserap 99,59 persen.
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 85.381.600,- dengan realisasi sebesar Rp 85.189.000,- atau terserap 99,77 persen.
 - d. Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 80.146.800,- dengan realisasi sebesar Rp 76.726.100,- atau terserap 95,73 persen.
 - e. Subkegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 17.203.900,- dengan realisasi sebesar Rp 13.734.800,- atau terserap 79,84 persen.

- f. Subkegiatan Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.047.100,- dengan realisasi sebesar Rp 14.869.552,- atau terserap 98,82 persen.

Indikator program yang ketiga pada program kepegawaian daerah adalah nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN pada penerapan sistem merit pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, Program ini dilaksanakan oleh 2 Bidang yaitu Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi. Target program pada tahun 2024 adalah 100 poin, realisasi program sebesar 112 poin, dan capaian kinerja program sebesar 112,09 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 559.690.000,- terealisasi sebesar Rp 521.398.830,- atau sebesar 93,16 persen.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu :

1. **Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**, dengan realisasi sebesar Rp 451.690.500,- dari anggaran Rp 419.062.130,- atau terserap 92,78 persen, yang terdiri dari 5 subkegiatan, yaitu :
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 151.466.200,- dengan realisasi sebesar Rp 140.301.300,- atau terserap 92,63 persen.
 - b. Subkegiatan Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 107.985.800,- dengan realisasi sebesar Rp 105.310.700,- atau terserap 97,52 persen.
 - c. Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.338.700,- dengan realisasi sebesar Rp 78.536.130,- atau terserap 89,92 persen.
 - d. Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 69.953.000,- dengan realisasi sebesar Rp 62.290.000,- atau terserap 89,05 persen.
 - e. Subkegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.946.800,- dengan realisasi sebesar Rp 32.624.000,- atau terserap 93,35 persen.
2. **Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN**, dengan realisasi sebesar Rp 102.336.700,- dari anggaran Rp 107.999.500,- atau

terserap 94,76 persen, yang terdiri dari 1 Subkegiatan, yaitu :

- a. Subkegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 107.999.500,- dengan realisasi sebesar Rp 102.336.700,- atau terserap 94,76 persen.

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator pada program pengembangan SDM adalah persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, yang merupakan indikator yang masuk dalam penilaian dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit. program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. Target program pada tahun 2024 adalah 123 poin, realisasi program sebesar 95 poin, dan capaian kinerja program sebesar 77,24 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.941.369.100,- terealisasi sebesar Rp 2.906.350.800,- atau sebesar 98,81 persen.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu :

1. **Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**, dengan realisasi sebesar Rp 133.482.000,- dari anggaran Rp 134.757.000,- atau terserap 99,05 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 133.482.000,- dengan realisasi sebesar Rp 134.757.000,- atau terserap 99,05 persen.
2. **Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**, dengan realisasi sebesar Rp 2.772.868.800,- dari anggaran Rp 2.806.612.100,- atau terserap 98,80 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Subkegiatan Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan serta jabatan fungsional. Anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 50.688.500,- dengan realisasi sebesar Rp 49.482.700,- atau terserap 97,62 persen.
 - b. Subkegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,

JPT, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp 2.755.923.600,- dengan realisasi sebesar Rp 2.723.386.100,- atau terserap 98,82 persen.

Kedua subkegiatan tersebut sebagai pendukung pelaksanaan penyelenggaraan diklat dalam menyediakan perencanaan kebutuhan diklat yang tertuang dalam dokumen Analisa Kebutuhan Diklat atau Human Capital Development Plan (HCDP), serta menyediakan dokumen.

C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hasil penilaian Survey Kepuasan Layanan Kepegawaian, program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2024 bahwa pagu anggaran sebesar Rp 18.471.534.500,- telah terealisasi sebesar Rp 17.819.804.286,- dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 96,47%. Keberhasilan program internal BKPSDM Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan internal OPD didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai, dan anggaran dari APBD. Program internal tersebut terdiri dari 8 (delapan) kegiatan antara lain perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, administrasi keuangan Perangkat Daerah, administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah, administrasi kepegawaian Perangkat Daerah, administrasi umum Perangkat Daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah. Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon Tahun 2024

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
5-3-5-4.0-0.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		24.086.761.300,00	23.237.974.012,00	96,48	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18.471.534.500,00	17.819.804.286,00	96,47	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		120.144.500,00	115.001.140,00	95,72	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.187.500,00	12.187.500,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.01.0001.01.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.731.000,00	4.731.000,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.01.0006.01.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		103.226.000,00	98.082.640,00	95,02	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.01.0007.01.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8,00	8,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.292.667.600,00	15.741.748.133,00	96,62	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16.281.092.000,00	15.730.172.533,00	96,62	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.02.0001.01.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi

5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6.536.700,00	6.536.700,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.02.0005.01.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		5.038.900,00	5.038.900,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.02.0007.01.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13,00	13,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.346.337.500,00	1.343.402.300,00	99,78	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.500.900,00	7.500.300,00	99,99	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0001.01.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		876.058.000,00	873.350.000,00	99,69	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0002.01.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.187.900,00	2.153.800,00	98,44	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0003.01.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		68.324.100,00	68.324.100,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0005.01.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		83.856.200,00	83.663.700,00	99,77	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0006.01.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi

5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material		183.975.700,00	183.975.700,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0007.01.	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0008.	Fasilitas Kunjungan Tamu		15.301.200,00	15.301.200,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0008.01.	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		102.927.600,00	102.927.600,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0009.01.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		6.205.900,00	6.205.900,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.06.0010.01.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		371.786.300,00	288.978.788,00	77,73	Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		328.761.200,00	245.954.288,00	74,81	Sedang
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.08.0002.01.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		43.025.100,00	43.024.500,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.08.0003.01.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		340.598.600,00	330.673.925,00	97,09	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.0.00.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		22.565.000,00	16.359.700,00	72,50	Sedang

5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.09.0001.01.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	23,00	23,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		10.189.000,00	9.009.000,00	88,42	Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.09.0002.01.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		307.844.600,00	305.305.225,00	99,18	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.0.00.01.2.09.0009.01.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		2.673.857.700,00	2.511.818.926,00	93,94	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1.074.005.500,00	959.335.314,00	89,32	Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.5.03.02.2.01.0002.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		539.665.700,00	490.899.814,00	90,96	Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.5.03.02.2.01.0002.01.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.5.03.02.2.01.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		196.019.900,00	172.139.500,00	87,82	Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.5.03.02.2.01.0006.01.	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.5.03.02.2.01.0008.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		107.999.500,00	102.336.700,00	94,76	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.5.03.02.2.01.0008.01.	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4.0-0.01.5.03.02.2.01.0010.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		114.563.600,00	102.303.000,00	89,30	Tinggi

5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.01.0010.01.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.01.0011.	Pengelolaan Data Kepegawaian		23.377.900,00	8.084.400,00	34,58	Sangat Rendah
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.01.0011.01.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	6,00	6,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.01.0012.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		92.378.900,00	83.571.900,00	90,47	Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.01.0012.01.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN		604.817.800,00	599.004.530,00	99,04	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.02.0001.	Pengelolaan Mutasi ASN		205.468.000,00	205.071.700,00	99,81	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.02.0001.01.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.02.0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		162.123.100,00	161.622.500,00	99,69	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.02.0002.01.	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	14,00	14,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.02.0003.	Pengelolaan Promosi ASN		237.226.700,00	232.310.330,00	97,93	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.02.0003.01.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN		543.343.900,00	534.416.952,00	98,36	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0001.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		207.325.000,00	206.218.500,00	99,47	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0001.01.	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	250,00	15.399,00	6.159,60	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0002.	Pengelolaan Assessment Center		138.239.500,00	137.679.000,00	99,59	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0002.01.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi

5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0003.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		85.381.600,00	85.189.000,00	99,77	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0003.01.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0006.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		80.146.800,00	76.726.100,00	95,73	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0006.01.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang	120,00	75,00	62,50	Rendah
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0013.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		17.203.900,00	13.734.800,00	79,84	Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0013.01.	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	500,00	100,00	20,00	Sangat Rendah
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0014.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		15.047.100,00	14.869.552,00	98,82	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.03.0014.01.	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	100,00	304,00	304,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		451.690.500,00	419.062.130,00	92,78	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.0002.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		151.466.200,00	140.301.300,00	92,63	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.0002.01.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.0004.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		107.985.800,00	105.310.700,00	97,52	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.0004.01.	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	9,00	9,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.0007.	Pembinaan Disiplin ASN		87.338.700,00	78.536.130,00	89,92	Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.0007.01.	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	73,00	73,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.0008.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		69.953.000,00	62.290.000,00	89,05	Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.0008.01.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi

5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.0009.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		34.946.800,00	32.624.000,00	93,35	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.03.02.2.04.0009.01.	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		2.941.369.100,00	2.906.350.800,00	98,81	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis		134.757.000,00	133.482.000,00	99,05	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.04.02.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		134.757.000,00	133.482.000,00	99,05	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.04.02.2.01.0003.01.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	110,00	140,00	127,27	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		2.806.612.100,00	2.772.868.800,00	98,80	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.04.02.2.02.0001.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		50.688.500,00	49.482.700,00	97,62	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.04.02.2.02.0001.01.	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
5-3-5-4-0-0.01.5.04.02.2.02.0007.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		2.755.923.600,00	2.723.386.100,00	98,82	Sangat Tinggi

5-3-5-4.0-0.01.5.04.02.2.02.0007.01.	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
--------------------------------------	--	---------	------	------	--------	---------------

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Reviu Renstra Tahun 2024-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM Kabupaten Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024						Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan									
			Target		Realisasi		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)							
0,	Non Urusan																							
0.00.	Non Bidang Urusan																							
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM BKPSDM; Satuan: Persen	95,00	Persen	19.731.000.000	92,08	Persen	25.807.660.492	95	Per sen	18.471.534.500	95,09	Persen	17.819.804.286	100,1%	96,47%	95,00	Persen	17.153.445.300	94,06	Persen	60.780.910.078	99%	308%

0.00.0 1.2.01 .	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Satuan: BA	1	BA	245.00 0.000	2	BA	171.869 .700	1	BA	120.14 4.500	1	BA	115.001. 140	100,0%	95,7 2%	1	BA	120.1 79.00 0	1	BA	407.049 .840	133 %	166%
0.00.0 1.2.01 .000 1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Satuan: Dokumen	2	dok	30.000. 000	4	dok	32.672. 800	3	dok	12.187. 500	3	dok	12.187.5 00	100,0%	100,0 0%	2	dok	19.94 2.000	3	dok	64.802. 300	150 %	216%
0.00.0 1.2.01 .000 6.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Satuan: Laporan	2	dok	20.000. 000	4	dok	17.617. 000	2	Lap ora n	4.731.0 00	2	dok	4.731.00 0	100,0%	100,0 0%	2	dok	4.826. 000	3	dok	27.174. 000	133 %	136%
0.00.0 1.2.01 .000 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Satuan: Laporan	7	dok	195.00 0.000	12	dok	121.579 .900	7	Lap ora n	103.22 6.000	7	Lap ora n	98.082.6 40	100,0%	95,02 %	7	dok	95.41 1.000	9	dok	315.073 .540	124 %	162%
		Diperolehnya sertifikat ISO	1	Serti fikat		2	Serti fikat		1	Sert ifik at		1	Serti fikat		100,0%		1	Serti fikat		1	Serti fikat		133 %	

0.00.0 1.2.02 .	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Satuan: BA	1	BA	15.052.000.000	2	BA	22.662.020.000	1	BA	16.292.667.600	1	BA	15.741.748.133	100,0%	96,62%	1	BA	15.082.420.100	1	BA	53.486.188.233	133%	355%
0.00.0 1.2.02 .000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; Satuan: Orang/bulan	95	orang/bulan	15.000.000.000	84	orang/bulan	22.634.895.700	81	orang/bulan	16.281.092.000	81	orang/bulan	15.730.172.533	100,0%	96,62%	95	orang/bulan	15.070.845.000	87	orang/bulan	53.435.913.233	91%	356%
0.00.0 1.2.02 .000 5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Satuan: Laporan	1	dok	17.000.000	2	dok	15.029.200	1	Laporan	6.536.700	1	Laporan	6.536.700	100,0%	100,00%	1	dok	6.536.200	1	dok	28.102.100	133%	165%
0.00.0 1.2.02 .000 7.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD; Satuan: Laporan	13	dok	35.000.000	26	dok	12.095.100	13	Laporan	5.038.900	13	dok	5.038.900	100,0%	100,00%	13	dok	5.038.900	17	dok	22.172.900	133%	63%

0.00.0 1.2.05 .	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Satuan: BA	1	BA	100.00 0.000	0	BA	-	0	BA	-	0	BA	-	#DIV /0!	1	BA	-	0	BA	-	33%	0%	
0.00.0 1.2.05 .0002.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan; Satuan: Paket	1	pak et	100.00 0.000	0	0	-	0	0	-	0	0	-	#DIV /0!	1	pake t	-	0	pak et	-	33%	0%	
0.00.0 1.2.06 .	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Satuan: BA	1	BA	2.482.0 00.000	2	BA	1.386.4 50.750	1	BA	1.346.3 37.500	1	BA	1.343.40 2.300	100,0%	99,7 8%	1	BA	1.413. 729.1 00	1	BA	4.143.5 82.150	133 %	167%
0.00.0 1.2.06 .000 1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan; Satuan: Paket	1	pak et	13.000. 000	2	pak et	15.862. 300	1	Pak et	7.500.9 00	1,00	Pak et	7.500.30 0	100,0%	99,99 %	1	pake t	7.492. 800	1	pak et	30.855. 400	133 %	237%
0.00.0 1.2.06 .000 2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Satuan: Paket	1	pak et	1.500.0 00.000	119	Unit	609.983 .000	1	Pak et	876.05 8.000	1	Pak et	873.350. 000	100,0%	99,69 %	1	pake t	938.5 58.10 0	40	pak et	2.421.8 91.100	403 3%	161%

0.00.0 1.2.06 .000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Satuan: Paket	1,00	paket	51.000.000	2,00	Paket	3.745.000	1	Paket	2.187.900	1,00	Paket	2.153.800	100,0%	98,44%	1,00	paket	2.784.100	1	paket	8.682.900	133%	17%
0.00.0 1.2.06 .000 4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan; Satuan: Paket	1,00	paket	44.000.000	9	Bulan	21.060.000	0	0	-	0,00	-	-			1,00	paket	-	3	paket	21.060.000	333%	48%
0.00.0 1.2.06 .000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan; Satuan: Paket	1,00	paket	115.000.000	2,00	Paket	116.126.000	1	Paket	68.324.100	1,00	Paket	68.324.100	100,0%	100,00%	1,00	paket	68.394.600	1	paket	252.844.700	133%	220%
0.00.0 1.2.06 .000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan; Satuan: Dokumen	12,00	Dokumen	84.000.000	22	Dokumen	119.912.000	12	Dokumen	83.856.200	12,00	Dokumen	83.663.700	100,0%	99,77%	12,00	Dokumen	84.950.000	15	Dokumen	288.525.700	128%	343%
0.00.0 1.2.06 .000 7.	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan; Satuan: Paket	1,00	paket	300.000.000	2,00	Paket	224.146.600	1	Paket	183.975.700	1,00	Paket	183.975.700	100,0%	100,00%	1,00	paket	173.425.600	1	paket	581.547.900	133%	194%
0.00.0 1.2.06 .000 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu; Satuan: Laporan	12,00	Laporan	40.000.000	24,00	Laporan	24.335.000	12	Laporan	15.301.200	12,00	Laporan	15.301.200	100,0%	100,00%	12,00	Laporan	15.310.600	16	Laporan	54.946.800	133%	137%
0.00.0 1.2.06 .000 9.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12,00	Laporan	250.000.000	24,00	Laporan	184.546.750	12	Laporan	102.927.600	12,00	Laporan	102.927.600	100,0%	100,00%	12,00	Laporan	103.662.600	16	Laporan	391.136.950	133%	156%

		SKPD; Satuan: Laporan																						
0.00.0 1.2.06 .001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; Satuan: Dokumen	1,00	Dokumen	85.000.000	24,00	Dokumen	66.734.100	12	Dokumen	6.205.900	12,00	Dokumen	6.205.900	100,0%	100,0%	1,00	Dokumen	19.150.700	12	Dokumen	92.090.700	1233%	108%
0.00.0 1.2.07 .	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Satuan: BA	1	BA	-	2	BA	-	0	BA	-	1	BA	-	#DIV/0!	1	BA	-	1	BA	-	133%	#DIV/0!	
0.00.0 1.2.07 .000 2.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan; Satuan: Unit	0	0	-	0	unit	-	0	0	-	0	-	-			0	0	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
0.00.0 1.2.08 .	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	BA	752.000.000	2	BA	546.647.983	1	BA	371.786.300	1	BA	288.978.788	100,0%	77,73%	1	BA	366.560.000	1	BA	1.202.186.771	133%	160%

		Daerah; Satuan: BA																						
0.00.0 1.2.08 .0002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Satuan: Laporan	12,00	Laporan	700.000.000	24,00	Laporan	467.591.037	12	Laporan	328.761.200	12,00	Laporan	245.954.288	100,0%	74,81%	12,00	Laporan	327.980.000	16	Laporan	1.041.525.325	133%	149%
0.00.0 1.2.08 .0003.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Satuan: Laporan	1,00	Laporan	52.000.000	2,00	Laporan	79.056.946	1	Laporan	43.025.100	1,00	Laporan	43.024.500	100,0%	100,0%	1,00	Laporan	38.580.000	1	Laporan	160.661.446	133%	309%
0.00.0 1.2.09 .	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Satuan: BA	1	BA	1.100.000.000	2	BA	1.040.672.059	1	BA	340.598.600	1	BA	330.673.925	100,0%	97,09%	1	BA	170.557.100	1	BA	1.541.903.084	133%	140%
0.00.0 1.2.09 .0001.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Yang diurus perizinannya	23	Unit	300.000.000	23,00	Unit	226.301.100	23	Unit	22.565.000	23,00	Unit	16.359.700	100,0%	72,50%	23	Unit	-	23	Unit	242.660.800	100%	81%

0.00.0 1.2.09 .000 2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas lapangan Yang diurus perizinannya	1	Unit	30.000.000	1	unit	18.385.700	1	unit	10.189.000	1	unit	9.009.000	100,0%	88,42 %	1	Unit	11.180.000	1	Unit	38.574.700	100 %	129%
0.00.0 1.2.09 .000 9.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; Satuan: Unit	2	Unit	770.000.000	2	Unit	795.985.259	2	Unit	307.844.600	2	Unit	305.305.225	100,0%	99,18 %	2	Unit	159.377.100	2	Unit	1.260.667.584	100 %	164%
5.03.0 2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN pada penerapan sistem merit; Satuan: Poin	83	poin	5.092.000.000	88,5	poin	1.386.546.500	82	poin	966.006.000	82	poin	856.998.614	100,0%	88,72 %	83	poin	957.334.500	85	poin	3.200.879.614	102 %	63%
		Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit; Satuan: Poin	128	poin	21.745.000.000	102,5	poin	5.824.817.973	123	poin	4.089.530.800	95	poin	4.039.772.282	77,24%	98,78 %	128	poin	10.713.157.140	109	poin	20.577.747.395	85%	95%
		Nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN pada	104	poin	3.261.000.000	107,5	poin	727.055.089	100	poin	559.690.000	112	poin	521.398.830	112,0%	93,16 %	104	poin	571.420.600	108	poin	1.819.874.519	104 %	56%

		penerapan sistem merit; Satuan: Poin																						
5.03.0 2.2.01 .	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Satuan: BA	1	BA	6.043.000.000	2	BA	1.466.963.200	1	BA	1.074.005.500	1	BA	959.335.314	100,0%	89,32%	1	BA	1.091.216.900	1	BA	3.517.515.414	133%	58%
5.03.0 2.2.01 .000 2.	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Satuan: Dokumen	1	dok	3.872.000.000	2	Dokumen	701.833.600	1	dok	539.665.700	1	Dokumen	490.899.814	100,0%	90,96%	1	dok	539.665.600	1	dok	1.732.399.014	133%	45%
5.03.0 2.2.01 .000 6.	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Satuan: Dokumen	12	Dokumen	285.000.000	24	Dokumen	363.094.400	12	Dokumen	196.019.900	12	Dokumen	172.139.500	100,0%	87,82%	12	Dokumen	196.019.800	16	Dokumen	731.253.700	133%	257%
5.03.0 2.2.01 .000 7.	Evaluasi pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian	1	Dokumen	58.000.000	0	oran g	-	0	0	-	0	-	-			1	Dokumen	-	0	Dokumen	-	33%	0%

		ASN; Satuan: Dokumen																						
5.03.0 2.2.01 .000 8.	fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi; Satuan: Lembaga	1	Lem bag a	951.00 0.000	1	Lem bag a	80.416. 700	1	Le mb aga	107.99 9.500	1	Lem bag a	102.336. 700	100,0%	94,76 %	1	Lem bag a	133.8 82.40 0	1	Lem bag a	316.635 .800	100 %	33%
5.03.0 2.2.01 .001 0.	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Satuan: Dokumen	1	Dok ume n	500.00 0.000	1	Dok ume n	132.095 .600	1	Dok um en	114.56 3.600	1	Dok ume n	102.303. 000	100,0%	89,30 %	1	Doku men	114.5 63.50 0	1	Dok ume n	348.962 .100	100 %	70%
5.03.0 2.2.01 .001 1.	Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian; Satuan: Dokumen	6	Dok ume n	77.000. 000	12	Dok ume n	21.663. 000	6	dok	23.377. 900	6	Dok ume n	8.084.40 0	100,0%	34,58 %	6	Doku men	23.37 7.800	8	Dok ume n	53.125. 200	133 %	69%
5.03.0 2.2.01 .001 2.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian; Satuan: Laporan	1	Lap oran	300.00 0.000	2	Lap oran	167.859 .900	1	Lap ora n	92.378. 900	1	Lap ora n	83.571.9 00	100,0%	90,47 %	1	Lapo ran	83.70 7.800	1	Lap oran	335.139 .600	133 %	112%
5.03.0 2.2.02 .	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN; Satuan: BA	1	BA	1.550.0 00.000	2	BA	1.564.7 13.736	1	BA	604.81 7.800	1	BA	599.004. 530	100,0%	99,0 4%	1	BA	983.4 37.00 0	1	BA	3.147.1 55.266	133 %	203%

5.03.0 2.2.02 .000 1.	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah; Satuan: Dokumen	1	dok	600.00 0.000	2	Dokumen	959.981 .900	1	dok	205.46 8.000	1	Dokumen	205.071. 700	100,0%	99,81 %	1	dok	408.8 00.50 0	1	dok	1.573.8 54.100	133 %	262%
5.03.0 2.2.02 .000 2.	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; Satuan: Dokumen	14 ,0 0	dok	350.00 0.000	28	Dokumen	308.703 .524	14	dok	162.12 3.100	14	Dokumen	161.622. 500	100,0%	99,69 %	14,0 0	dok	202.2 06.80 0	19	dok	672.532 .824	133 %	192%
5.03.0 2.2.02 .000 3.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN; Satuan: Dokumen	1	dok	600.00 0.000	2	Dokumen	296.028 .312	1	dok	237.22 6.700	1	Dokumen	232.310. 330	100,0%	97,93 %	1	dok	372.4 29.70 0	1	dok	900.768 .342	133 %	150%
5.03.0 2.2.03 .	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN; Satuan: BA	1	BA	12.136. 000.00 0	2	BA	1.546.5 26.699	1	BA	543.34 3.900	1	BA	534.416. 952	100,0%	98,3 6%	1	BA	2.799. 322.4 00	1	BA	4.880.2 66.051	133 %	40%
5.03.0 2.2.03 .000 1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya; Satuan: Orang	10 0	Orang	6.215.0 00.000	250	Orang	432.279 .300	250	orang	207.32 5.000	1539 9	Orang	206.218. 500	6159,6 %	99,47 %	100	Orang	1.671. 815.0 00	5.25 0	Orang	2.310.3 12.800	525 0%	37%
5.03.0 2.2.03	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan	1	dok	1.000.0 00.000	2	Dokumen	492.805 .915	1	dok	138.23 9.500	1	Dokumen	137.679. 000	100,0%	99,59 %	1	dok	620.4	1	dok	1.250.9 02.515	133 %	125%

.000 2.		Assessment Center; Satuan: Dokumen																17.60 0						
5.03.0 2.2.03 .0003.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; Satuan: Dokumen	1	Dok ume n	903.00 0.000	1	Dok ume n	202.586 .937	1	dok	85.381. 600	1	Dok ume n	85.189.0 00	100,0%	99,77 %	1	Doku men	370.3 18.40 0	1	Dok ume n	658.094 .337	100 %	73%
5.03.0 2.2.03 .000 4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan; Satuan: Orang	10 0	Ora ng	908.00 0.000	142	Ora ng	246.479 .900	0	0	-	0	0	-	#DIV/0! #DIV /0!	#DIV /0!	100	Oran g	-	81	Ora ng	246.479 .900	81%	27%
5.03.0 2.2.03 .000 6.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan; Satuan: Orang	10 0	oran g	1.505.0 00.000	120	oran g	107.103 .209	120	ora ng	80.146. 800	75	ora ng	76.726.1 00	62,5%	95,73 %	100	oran g	86.09 6.800	98	oran g	269.926 .109	98%	18%
5.03.0 2.2.03 .001 3.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina; Satuan: Orang	10 0	oran g	100.00 0.000	500	oran g	22.361. 957	500	ora ng	17.203. 900	100	ora ng	13.734.8 00	20,0%	79,84 %	100	oran g	20.94 0.300	233	oran g	57.037. 057	233 %	57%
5.03.0 2.2.03 .001 4.	Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir; Satuan: Orang	10 0	oran g	1.505.0 00.000	170	oran g	42.909. 481	100	ora ng	15.047. 100	304	ora ng	14.869.5 52	304,0%	98,82 %	100	oran g	29.73 4.300	191	oran g	87.513. 333	191 %	6%

5.03.0 2.2.04 .	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Satuan: BA	1	BA	2.310.000.000	2	BA	646.638.389	1	BA	451.690.500	1	BA	419.062.130	100,0%	92,78%	1	BA	437.538.200	1	BA	1.503.238.719	133%	65%
5.03.0 2.2.04 .000 1.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Satuan: Dokumen	1	dok	155.000.000	1	dok	112.674.700				0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	dok	-	1	dok	112.674.700	67%	73%
5.03.0 2.2.04 .000 2.	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Satuan: Dokumen	12	dok	500.000.000	21	dok	157.382.650	12	dok	151.466.200	12	dok	140.301.300	100,0%	92,63%	12	dok	159.761.100	15	dok	457.445.050	125%	91%
5.03.0 2.2.04 .000 4.	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan; Satuan: Orang	9	orang	275.000.000	18	orang	132.778.588	9	orang	107.985.800	9	orang	105.310.700	100,0%	97,52%	9	orang	87.798.200	12	orang	325.887.488	133%	119%
5.03.0 2.2.04 .000 5.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa; Satuan: Orang	100	orang	300.000.000	2	dok	28.548.648	0	orang	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	orang	-	34	orang	28.548.648	34%	10%
5.03.0 2.2.04 .000 7.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan; Satuan: Orang	73	orang	500.000.000	71	orang	97.203.343	73	orang	87.338.700	73	orang	78.536.130	100,0%	89,92%	73	orang	101.085.000	72	orang	276.824.473	99%	55%

5.03.0 2.2.04 .000 8.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Satuan: Laporan	12	Lap oran	380.00 0.000	24	Lap oran	85.494. 660	12	Lap ora n	69.953. 000	12	Lap ora n	62.290.0 00	100,0%	89,05 %	12	Lapo ran	52.98 8.300	16	Lap oran	200.772 .960	133 %	53%
5.03.0 2.2.04 .000 9.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani; Satuan: Dokumen	12	Dok ume n	200.00 0.000	24	Dok ume n	32.555. 800	12	dok	34.946. 800	12	Dok ume n	32.624.0 00	100,0%	93,35 %	12	Doku men	35.90 5.600	16	Dok ume n	101.085 .400	133 %	51%
5.04.0 2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit; Satuan: Poin	12 8	poin	8.059.0 00.000	102, 5	poin	2.713.5 77.538	123	poi n	2.941.3 69.100	95	poin	2.906.35 0.800	77,24%	98,8 1%	128	poin	6.930. 397.7 40	109	poin	12.550. 326.078	85%	156%
5.04.0 2.2.01 .	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis; Satuan: BA	1, 00	BA	983.00 0.000			1.154.9 33.100	1	BA	134.75 7.000	1	BA	133.482. 000	100,0%	99,0 5%	1,00	BA	465.7 91.50 0	1	BA	1.754.2 06.600	67%	178%

5.04.0 2.2.01 .000 3.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi; Satuan: Orang	10 0	orang	983.00 0.000	200	orang	1.154.9 33.100	110	orang	134.75 7.000	140	orang	133.482. 000	127,3%	99,05 %	100	orang	465.7 91.50 0	147	orang	1.754.2 06.600	147 %	178%
5.04.0 2.2.02 .	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional; Satuan: BA	1	BA	7.076.0 00.000	2	BA	1.558.6 44.438	1	BA	2.806.6 12.100	1	BA	2.772.86 8.800	100,0%	98,8 0%	1	BA	6.464. 606.2 40	1	BA	10.796. 119.478	133 %	153%

5.04.0 2.2.02 .000 1.	Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan serta jabatan fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun; Satuan: Dokumen	1	dok	200.00 0.000	2	Dokumen	127.459 .998	1	dok	50.688. 500	1	Dokumen	49.482.7 00	100,0%	97,62 %	1	dok	198.9 99.00 0	1	dok	375.941 .698	133 %	188%
5.04.0 2.2.02 .000 7.	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, JPT, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan; Satuan: Laporan	1	dok	6.876.0 00.000	2	Laporan	1.431.1 84.440	1	Laporan	2.755.9 23.600	1	Laporan	2.723.38 6.100	100,0%	98,82 %	1	dok	6.265. 607.2 40	1	dok	10.420. 177.780	133 %	152%

Sumber: Aplikasi SIMONEK Kabupaten Cirebon

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 3 program dengan 4 indikator kinerja program dan 11 (sebelas) kegiatan, 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan 43 indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, 3 indikator sesuai target yang mana 1 indikator didalamnya merupakan hasil penilaian terhadap Survey Kepuasan Layanan Kepegawaian yang merupakan program internal Perangkat Daerah;
 - c. Dari 43 indikator kinerja sub kegiatan, 43 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon :
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 3 program dengan 4 indikator kinerja program, 11 indikator kinerja kegiatan, 42 indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan telah memenuhi target Renstra; dan
 - c. Dari 11 indikator kinerja kegiatan dan 43 indikator subkegiatan yang ditetapkan, diperkirakan telah memenuhi target Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon adalah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan Daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan BKPSDM;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator program sebagai berikut :

1. Nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN pada penerapan sistem merit;
2. Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit;
3. Nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN pada penerapan sistem merit; dan
4. Hasil Survey Kepuasan Layanan Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon melaksanakan Urusan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Selain itu jika di ukur dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon memperoleh nilai A (sangat baik) dengan nilai 95,09. Secara lengkap, pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon terdapat dalam Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
sampai dengan Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan :										
1. Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	74	75	80	81	79,95	79,57	80	81	
2. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda (Poin)	79	70	68,50	69	67,84	66,20	68,50	69	
Sasaran :										
1. Meningkatnya Implementasi Sistem Merit	Indeks Sistem Merit (Poin)	300	305	315	325	298,5	289	315	325	
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP BKPSDM (Poin)	73,00	73,60	74	75	73,60	73,60	74	75	

(Sumber: Perencanaan BKPSDM Kabupaten Cirebon).

Pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkualitas serta Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai SAKIP Pemda, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 79,57 poin dari target sebesar 75,00 dengan capaian kinerja sebesar 106,09 persen sedangkan indikator Nilai SAKIP Pemda tidak tercapai dengan capaian kinerja sebesar 94,57 persen; dan
2. Sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Indeks Sistem Merit dan Nilai LKIP BKPSDM, dengan realisasi Indeks Sistem Merit sebesar 289 poin dari target sebesar 305 poin dengan capaian kinerja sebesar 94,75 persen dan Nilai LKIP BKPSDM sebesar 73,60 poin dari target 73 poin dengan capaian kinerja sebesar 100,82 persen.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya :

1. Proses yang panjang untuk melaksanakan pelantikan dan penataan pegawai karena belum ada Bupati definitif. Penjabat (Pj) Bupati memiliki kewenangan yang terbatas yang diatur oleh Perundang-Undangan, salah satunya adalah penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas yang membutuhkan persetujuan teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan. Prosedur yang harus ditempuh dengan mengirimkan data calon-calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, juga wajib ada rekomendasi dari KASN yang mana prosesnya sampai dengan disetujui usulan membutuhkan waktu yang lama;

2. Realisasi anggaran rekrutmen CASN yang tidak dapat tercapai secara maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta Badan Kepegawaian Negara khususnya dalam penetapan jumlah formasi yang sangat mempengaruhi jumlah peserta seleksi dan waktu pelaksanaan kegiatan;
3. Kendala dalam pemberian layanan administrasi kepegawaian di Tahun 2024 yaitu pemohon layanan tidak segera melengkapi berkas administrasi usulan, sehingga proses usulan mundur dari waktu yang telah ditetapkan;
4. Kendala sistem (gangguan jaringan dan koneksi internet, gangguan teknis aplikasi).

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Cirebon antara lain :

1. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan KASN untuk percepatan pelaksanaan kegiatan penataan;
2. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen CASN;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pemohon layanan dengan baik serta melaksanakan evaluasi/survey kepuasan masyarakat secara berkala, untuk peningkatan mutu layanan;
4. Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon jika terdapat kendala sistem dan jaringan.

Secara keseluruhan keberhasilan ketercapaian sasaran BKPSDM Kabupaten Cirebon didukung oleh :

1. Dukungan Pimpinan BKPSDM Kabupaten Cirebon dalam berbagai aspek dimulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon serta dukungan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran strategis Perangkat Daerah juga Visi Misi Kabupaten Cirebon;
2. Dukungan Pimpinan BKPSDM untuk terus berkarya dan berinovasi;
3. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama internal yang solid di BKPSDM Kabupaten Cirebon;
4. Proses bisnis di BKPSDM Kabupaten Cirebon dari hulu ke hilir (proses rekrutmen

- calon pegawai sampai dengan pensiunnya pegawai) saling terhubung dengan baik;
5. Adanya komitmen pegawai BKPSDM Kabupaten Cirebon menjadi pegawai yang kompeten, berakhlak dan berkinerja;
 6. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan;
 7. Adanya dukungan dari Perangkat Daerah lain di Kabupaten Cirebon maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan;
 8. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selanjutnya Isu-isu strategis dalam manajemen kepegawaian antara lain :

1. Implementasi manajemen karier dan manajemen talenta SDM untuk mewujudkan ASN yang professional dan berintegritas;
2. Kesenjangan Kompetensi ASN;
3. Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi;
4. Penataan pegawai melalui pengadaan, mutasi, rotasi dan promosi.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 adalah **“Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan dan Sumber Daya Manusia Kompetitif”**. Kabupaten Cirebon dengan 4 (empat) tujuan daerah, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender;
3. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif;
4. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Kondusifitas Daerah.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Cirebon dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor unggulan;
2. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah;
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
5. Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat;

6. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
7. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
8. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat;
10. Meningkatnya kondusifitas Wilayah;
11. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum.

Sesuai tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah pendukung dan penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam hal ini upaya yang dilakukan dalam mendukung 11 (sebelas) sasaran daerah melalui peningkatan kapasitas SDM dan layanan kepegawaian.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
0,	NON URUSAN					22.520.637.000	NON URUSAN					22.520.637.000	
0.00.	NON BIDANG URUSAN					22.520.637.000	NON BIDANG URUSAN					22.520.637.000	
0.00.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM BKPSDM	95	Persen	22.520.637.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM BKPSDM	95	Persen	22.520.637.000	
0.00.0 1.2.01 .	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	BA	242.217.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	BA	242.217.000	
0.00.0 1.2.01 .000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	16.189.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	16.189.000	
0.00.0 1.2.01 .000 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	

0.00.0 1.2.01 .000 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	
0.00.0 1.2.01 .000 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	
0.00.0 1.2.01 .000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	30.000.000	
0.00.0 1.2.01 .000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	4.755.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	4.755.000	
0.00.0 1.2.01 .000 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	101.273.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	101.273.000	
0.00.0 1.2.02 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	BA	16.081.576.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	BA	16.081.576.000	
0.00.0 1.2.02 .000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	Orang/bulan	16.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	Orang/bulan	16.000.000.000	

0.00.0 1.2.02 .000 3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	35.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	35.000.000
0.00.0 1.2.02 .000 4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	35.000.000
0.00.0 1.2.02 .000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	6.537.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	6.537.000
0.00.0 1.2.02 .000 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan	5.039.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan	5.039.000
0.00.0 1.2.03 .	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	BA	36.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	BA	36.000.000
0.00.0 1.2.03 .000 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	18.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	18.000.000
0.00.0 1.2.03 .000 5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	18.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	18.000.000

0.00.0 1.2.05 .	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	BA	140.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	BA	140.000.000	
0.00.0 1.2.05 .000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	110.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	110.000.000	
0.00.0 1.2.05 .000 3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	30.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	30.000.000	
0.00.0 1.2.06 .	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	BA	1.211.188.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	BA	1.211.188.000	
0.00.0 1.2.06 .000 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.499.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.499.000	
0.00.0 1.2.06 .000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	691.683.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	691.683.000	
0.00.0 1.2.06 .000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.337.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.337.000	
0.00.0 1.2.06 .000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	48.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	48.000.000	
0.00.0 1.2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	68.342.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	68.342.000	

.000 5.													
0.00.0 1.2.06 .000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	84.130.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	84.130.000	
0.00.0 1.2.06 .000 7.	Penyediaan Bahan/Material	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	181.339.000	Penyediaan Bahan/Material	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	181.339.000	
0.00.0 1.2.06 .000 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.304.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.304.000	
0.00.0 1.2.06 .000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	103.112.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	103.112.000	
0.00.0 1.2.06 .001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	9.442.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	9.442.000	
0.00.0 1.2.07 .000 1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	BA	3.704.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	BA	3.704.000.000	
0.00.0 1.2.07 .000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	554.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	554.000.000	
0.00.0 1.2.07 .000 5.	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	150.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	150.000.000	

0.00.0 1.2.07 .001 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	3.000.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	3.000.000.000
0.00.0 1.2.08 .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	BA	748.473.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	BA	748.473.000
0.00.0 1.2.08 .000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	80.000.000
0.00.0 1.2.08 .000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	328.566.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	328.566.000
0.00.0 1.2.08 .000 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	39.907.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	39.907.000
0.00.0 1.2.08 .000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	300.000.000
0.00.0 1.2.09 .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	BA	357.183.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	BA	357.183.000

0.00.0 1.2.09 .000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	Unit	22.565.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	Unit	22.565.000
0.00.0 1.2.09 .000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	10.437.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	10.437.000
0.00.0 1.2.09 .000 5.	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	50.000.000
0.00.0 1.2.09 .000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	50.000.000
0.00.0 1.2.09 .000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	224.181.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	224.181.000
5,	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BKPSDM				12.855.878.000	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BKPSDM				12.855.878.000
5.03.	KEPEGAWAIAN	BKPSDM				9.417.240.000	KEPEGAWAIAN	BKPSDM				9.417.240.000
5.03.0 2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM	Nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN pada penerapan sistem merit	91	Poin	4.179.279.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM	Nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN pada penerapan sistem merit	91	Poin	4.179.279.000
			Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit	12 6	Poin	4.269.807.000			Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit	12 6	Poin	4.269.807.000

			Nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN pada penerapan sistem merit	10 8	Poin	968.154.000			Nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN pada penerapan sistem merit	10 8	Poin	968.154.000	
5.03.0 2.2.01 .	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1	BA	4.179.279.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1	BA	4.179.279.000	
5.03.0 2.2.01 .000 2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	539.666.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	539.666.000	
5.03.0 2.2.01 .000 3.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	3.000.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	3.000.000.000	
5.03.0 2.2.01 .000 6.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12	Dokumen	196.020.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12	Dokumen	196.020.000	
5.03.0 2.2.01 .000 7.	Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	63.000.000	Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	63.000.000	
5.03.0 2.2.01 .000 8.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	114.471.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	114.471.000	

5.03.0 2.2.01 .001 0.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	152.533.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	152.533.000
5.03.0 2.2.01 .001 1.	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6	Dokumen	23.378.000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6	Dokumen	23.378.000
5.03.0 2.2.01 .001 2.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	90.211.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	90.211.000
5.03.0 2.2.02 .	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1	BA	671.305.000	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1	BA	671.305.000
5.03.0 2.2.02 .000 1.	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	228.133.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	228.133.000
5.03.0 2.2.02 .000 2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	14	Dokumen	172.144.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	14	Dokumen	172.144.000
5.03.0 2.2.02 .000 3.	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	271.028.000	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	271.028.000
5.03.0 2.2.03 .	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1	BA	3.598.502.000	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1	BA	3.598.502.000

5.03.0 2.2.03 .000 1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	25 0	Orang	573.448.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	25 0	Orang	573.448.000
5.03.0 2.2.03 .000 2.	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	252.953.000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	252.953.000
5.03.0 2.2.03 .000 3.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	Dokumen	156.616.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	Dokumen	156.616.000
5.03.0 2.2.03 .000 4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 0	Orang	950.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 0	Orang	950.000.000
5.03.0 2.2.03 .000 5.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	Dokumen	57.000.000	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	Dokumen	57.000.000
5.03.0 2.2.03 .000 6.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	10 0	Orang	81.635.000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	10 0	Orang	81.635.000
5.03.0 2.2.03 .000 8.	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	10 0	Orang	1.456.000.000	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	10 0	Orang	1.456.000.000
5.03.0 2.2.03 .001 3.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	10 0	Orang	18.138.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	10 0	Orang	18.138.000
5.03.0 2.2.03 .001 4.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 0	Orang	52.712.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 0	Orang	52.712.000

5.03.0 2.2.04 .000 .	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	BA	968.154.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	BA	968.154.000	
5.03.0 2.2.04 .000 1.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	170.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	170.000.000	
5.03.0 2.2.04 .000 2.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12	Dokumen	153.540.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12	Dokumen	153.540.000	
5.03.0 2.2.04 .000 4.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9	Orang	102.939.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9	Orang	102.939.000	
5.03.0 2.2.04 .000 5.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	10 0	Orang	350.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	10 0	Orang	350.000.000	
5.03.0 2.2.04 .000 7.	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	73	Orang	90.776.000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	73	Orang	90.776.000	
5.03.0 2.2.04 .000 8.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	Laporan	65.712.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	Laporan	65.712.000	
5.03.0 2.2.04 .000 9.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12	Dokumen	35.187.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12	Dokumen	35.187.000	
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.438.638.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.438.638.000	

5.04.0 2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit	12 6	Poin	3.438.638.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit	12 6	Poin	3.438.638.000	
5.04.0 2.2.01 .	Pengembangan Kompetensi Teknis		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1	BA	217.516.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1	BA	217.516.000	
5.04.0 2.2.01 .000 3.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10 0	Orang	217.516.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	10 0	Orang	217.516.000	
5.04.0 2.2.02 .	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	BA	3.221.122.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	BA	3.221.122.000	

5.04.0 2.2.02 .000 1.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	87.767.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	87.767.000	
5.04.0 2.2.02 .000 7.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan	3.133.355.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan	3.133.355.000	
JUMLAH						35.376.515.000						35.376.515.000	

Sumber: RENSTRA 2025-2029 BKPSDM Kab. Cirebon

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh *stakeholders* BKPSDM Kabupaten Cirebon. BKPSDM Kabupaten Cirebon merupakan perangkat daerah penunjang sasaran Kabupaten Cirebon yaitu meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan sehingga BKPSDM berhubungan dengan kepegawaian dan pengembangan SDM di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, BKPSDM mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah sesuai tugasnya yaitu :

1. Melaksanakan penataan pegawai melalui pengadaan, mutasi, rotasi dan promosi;
2. Mewujudkan manajemen karier dan manajemen talenta SDM untuk mewujudkan ASN yang professional dan berintegritas;
3. Penilaian Kompetensi melalui metode Assessment Center untuk mendapatkan informasi profil potensi dan kompetensi ASN sertasebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir ASN;
4. Pengembangan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan pelatihan.

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Sasaran dan prioritas penyusunan RPJPN 2025-2045 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, melalui 5 sasaran visi sebagai berikut :

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan menuju dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia;
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI (*Human Capital Index*). Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun Menuju Net Zero Emission. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 misi (agenda) Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;

4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja serta BUMN) penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkantoran dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor

kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan :

1. Kesehatan untuk semua;
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial;
11. Stabilitas Ekonomi Makro;
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan;
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Tahap pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6 – 6,1 persen per tahun.

- 1. Transformasi sosial** dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
- 2. Transformasi ekonomi** difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah

Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa.

3. **Transformasi tata kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan yang memiliki kewajiban/tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tercantum pada RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026, yaitu “**Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan dan Sumber Daya Manusia Kompetitif**”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK;
2. Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau;
3. Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan;
4. Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta sistem perlindungan sosial;
5. Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah;
6. Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup;
7. Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan.

Sebagaimana prioritas pembangunan nasional, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Kabupaten Cirebon yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPD, serta isu strategis di tahun 2026, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2026 adalah: **“Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan dan Sumber Daya Manusia Kompetitif”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender;
3. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif;
4. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Kondusifitas Daerah.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor unggulan;
2. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah;
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
5. Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat;
6. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
7. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
8. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat;
10. Meningkatnya kondusifitas Wilayah;
11. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum.

Target sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon pada tahun 2026 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Kinerja Tahun
				2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71.81	72,92
2.	Angka Kemiskinan	Persen	11,20	9,75
3.	Angka Pengangguran (TPT)	Persen	7,65	6,10
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,08	5.70
5.	PDRB per Kapita ADHB	000 Rp	27.493,16	30,892.34
6.	Ketimpangan Pendapatan	Nilai	0,340	0.320

Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026, yaitu Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkualitas serta Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator tujuan Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai SAKIP pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yaitu Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dengan indikator sasaran Indeks Sistem Merit dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator sasaran Nilai LKIP BKPSDM hasil penilaian oleh Inspektorat. Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkualitas		Indeks Profesionalitas ASN	80,10 Poin	80,20	80,30	80,40	80,50
1.1.1.		Meningkatnya Implementasi Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	325,00 Poin	326,00	327,00	328,00	329,00
1.2.	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan		Nilai SAKIP Pemda	69,00 Poin	69,50	70,00	70,50	80,00
1.2.1.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP BKPSDM	74,50 Poin	75,00	75,50	76,00	76,50

Sumber : RENSTRA 2025-2029 BKPSDM Kab. Cirebon

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon pada tahun 2026 terdiri dari 3 (tiga) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar **35.376.515.000,-** (tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai berikut :

Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota	Usulan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)
0,	NON URUSAN	22.520.637.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN	22.520.637.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.520.637.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.217.000
0.00.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.189.000

0.00.01.2.01.000 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000
0.00.01.2.01.000 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000
0.00.01.2.01.000 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000
0.00.01.2.01.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	30.000.000
0.00.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.755.000
0.00.01.2.01.000 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.273.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.081.576.000
0.00.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.000.000.000
0.00.01.2.02.000 3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.000.000
0.00.01.2.02.000 4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.000.000
0.00.01.2.02.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.537.000
0.00.01.2.02.000 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.039.000
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.000.000
0.00.01.2.03.000 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18.000.000
0.00.01.2.03.000 5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.000.000
0.00.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110.000.000
0.00.01.2.05.000 3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.211.188.000
0.00.01.2.06.000 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.499.000
0.00.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	691.683.000
0.00.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.337.000
0.00.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.000.000
0.00.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.342.000
0.00.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	84.130.000
0.00.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	181.339.000
0.00.01.2.06.000 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.304.000
0.00.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.112.000
0.00.01.2.06.001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.442.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.704.000.000

0.00.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	554.000.000
0.00.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	150.000.000
0.00.01.2.07.001 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	748.473.000
0.00.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.000.000
0.00.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.566.000
0.00.01.2.08.000 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.907.000
0.00.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.183.000
0.00.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.565.000
0.00.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.437.000
0.00.01.2.09.000 5.	Pemeliharaan Mebel	50.000.000
0.00.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
0.00.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.181.000
5,	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.855.878.000
5.03.	KEPEGAWAIAN	9.417.240.000
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.417.240.000
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.179.279.000
5.03.02.2.01.000 2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	539.666.000
5.03.02.2.01.000 3.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3.000.000.000
5.03.02.2.01.000 6.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	196.020.000
5.03.02.2.01.000 7.	Evaluasi Pemberhentian ASN	63.000.000
5.03.02.2.01.000 8.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	114.471.000
5.03.02.2.01.001 0.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	152.533.000
5.03.02.2.01.001 1.	Pengelolaan Data Kepegawaian	23.378.000
5.03.02.2.01.001 2.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	90.211.000
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	671.305.000
5.03.02.2.02.000 1.	Pengelolaan Mutasi ASN	228.133.000
5.03.02.2.02.000 2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	172.144.000

5.03.02.2.02.000 3.	Pengelolaan Promosi ASN	271.028.000
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	3.598.502.000
5.03.02.2.03.000 1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	573.448.000
5.03.02.2.03.000 2.	Pengelolaan Assessment Center	252.953.000
5.03.02.2.03.000 3.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	156.616.000
5.03.02.2.03.000 4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	950.000.000
5.03.02.2.03.000 5.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	57.000.000
5.03.02.2.03.000 6.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	81.635.000
5.03.02.2.03.000 8.	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	1.456.000.000
5.03.02.2.03.001 3.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	18.138.000
5.03.02.2.03.001 4.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	52.712.000
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	968.154.000
5.03.02.2.04.000 1.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	170.000.000
5.03.02.2.04.000 2.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	153.540.000
5.03.02.2.04.000 4.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	102.939.000
5.03.02.2.04.000 5.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	350.000.000
5.03.02.2.04.000 7.	Pembinaan Disiplin ASN	90.776.000
5.03.02.2.04.000 8.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	65.712.000
5.03.02.2.04.000 9.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	35.187.000
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.438.638.000
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.438.638.000
5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	217.516.000
5.04.02.2.01.000 3.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	217.516.000
5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.221.122.000
5.04.02.2.02.000 1.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	87.767.000
5.04.02.2.02.000 7.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.133.355.000
JUMLAH		35.376.515.000

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Cirebon

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 serta Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon memiliki peran dalam pencapaian tujuan Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkualitas serta Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Indeks Sistem Merit dan Nilai LKIP BKPSDM;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Cirebon;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

4.1.1 Program dan kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon memiliki 3 (tiga) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp **35.376.515.000,-** (tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, yaitu :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Cirebon

SKPD: 5-3.5-4.0-0.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0,	NON URUSAN				22.520.637.000				24.218.778.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN				22.520.637.000				24.218.778.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM BKPSDM		95 Persen	22.520.637.000			95 Persen	24.218.778.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	242.217.000	PIS		1 BA	248.329.000
0.00.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	16.189.000	PIS		2 Dokumen	16.999.000
0.00.01.2.01.000 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	30.000.000	PIS		1 Dokumen	30.000.000
0.00.01.2.01.000 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	30.000.000	PIS		1 Dokumen	30.000.000
0.00.01.2.01.000 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	30.000.000	PIS		1 Dokumen	30.000.000
0.00.01.2.01.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 Dokumen	30.000.000	PIS		1 Dokumen	30.000.000

		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
0.00.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	4.755.000	PIS		2 Laporan	4.993.000
0.00.01.2.01.000 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	101.273.000	PIS		6 Laporan	106.337.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	16.081.576.000	PIS		1 BA	17.082.155.000
0.00.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		84 Orang/bulan	16.000.000.000	PIS		84 Orang/bulan	17.000.000.000
0.00.01.2.02.000 3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	35.000.000	PIS		1 Dokumen	35.000.000
0.00.01.2.02.000 4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	35.000.000	PIS		12 Dokumen	35.000.000
0.00.01.2.02.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	6.537.000	PIS		1 Laporan	6.864.000
0.00.01.2.02.000 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		13 Laporan	5.039.000	PIS		13 Laporan	5.291.000
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 BA	36.000.000	PIS		1 BA	38.000.000
0.00.01.2.03.000 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	18.000.000	PIS		1 Dokumen	19.000.000

0.00.01.2.03.000 5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	18.000.000	PIS		12 Laporan	19.000.000
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		I BA	140.000.000	PIS		I BA	150.000.000
0.00.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		I Paket	110.000.000	PIS		I Paket	120.000.000
0.00.01.2.05.000 3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		I Dokumen	30.000.000	PIS		I Dokumen	30.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		I BA	1.211.188.000	PIS		I BA	1.269.352.000
0.00.01.2.06.000 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		I Paket	7.499.000	PIS		I Paket	7.874.000
0.00.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		I Paket	691.683.000	PIS		I Paket	726.268.000
0.00.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		I Paket	2.337.000	PIS		I Paket	2.454.000
0.00.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		I Paket	48.000.000	PIS		I Paket	48.000.000
0.00.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		I Paket	68.342.000	PIS		I Paket	71.760.000
0.00.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	84.130.000	PIS		12 Dokumen	88.337.000
0.00.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		I Paket	181.339.000	PIS		I Paket	190.406.000
0.00.01.2.06.000 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	15.304.000	PIS		12 Laporan	16.070.000
0.00.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	103.112.000	PIS		12 Laporan	108.268.000

0.00.01.2.06.001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		I Dokumen	9.442.000	PIS		I Dokumen	9.915.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		I BA	3.704.000.000	PIS		I BA	4.264.000.000
0.00.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	554.000.000	PIS		2 Unit	564.000.000
0.00.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 Unit	150.000.000	PIS		20 Unit	200.000.000
0.00.01.2.07.001 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	3.000.000.000	PIS		1 Unit	3.500.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		I BA	748.473.000	PIS		I BA	796.898.000
0.00.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	80.000.000	PIS		1 Laporan	85.000.000
0.00.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	328.566.000	PIS		12 Laporan	344.995.000
0.00.01.2.08.000 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	39.907.000	PIS		1 Laporan	41.903.000
0.00.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	300.000.000	PIS		1 Laporan	325.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		I BA	357.183.000	PIS		I BA	370.044.000

0.00.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		23 Unit	22.565.000	PIS		23 Unit	23.694.000
0.00.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.437.000	PIS		1 Unit	10.959.000
0.00.01.2.09.000 5.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		20 Unit	50.000.000	PIS		20 Unit	50.000.000
0.00.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	50.000.000	PIS		10 Unit	50.000.000
0.00.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	224.181.000	PIS		2 Unit	235.391.000
5,	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.855.878.000				13.271.380.000
5.03.	KEPEGAWAIAN				9.417.240.000				9.660.809.000
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem Informasi ASN pada penerapan sistem merit		91 Poin	4.179.279.000			91 Poin	4.240.095.000
		Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit		126 Poin	4.269.807.000			127 Poin	4.365.151.000
		Nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN pada penerapan sistem merit		108 Poin	968.154.000			108 Poin	1.055.563.000
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1 BA	4.179.279.000	PIS		1 BA	4.240.095.000
5.03.02.2.01.000 2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 Dokumen	539.666.000	PIS		1 Dokumen	566.650.000

5.03.02.2.01.0003.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	3.000.000.000	PIS		1 Dokumen	3.000.000.000
5.03.02.2.01.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		12 Dokumen	196.020.000	PIS		12 Dokumen	205.821.000
5.03.02.2.01.0007.	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN		1 Dokumen	63.000.000	PIS		1 Dokumen	68.000.000
5.03.02.2.01.0008.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1 Lembaga	114.471.000	PIS		1 Lembaga	120.195.000
5.03.02.2.01.0010.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	152.533.000	PIS		1 Dokumen	160.160.000
5.03.02.2.01.0011.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		6 Dokumen	23.378.000	PIS		6 Dokumen	24.547.000
5.03.02.2.01.0012.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Laporan	90.211.000	PIS		1 Laporan	94.722.000
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		1 BA	671.305.000	PIS		1 BA	704.872.000
5.03.02.2.02.0001.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		1 Dokumen	228.133.000	PIS		1 Dokumen	239.540.000
5.03.02.2.02.0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		14 Dokumen	172.144.000	PIS		14 Dokumen	180.752.000
5.03.02.2.02.0003.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		1 Dokumen	271.028.000	PIS		1 Dokumen	284.580.000
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		1 BA	3.598.502.000	PIS		1 BA	3.660.279.000
5.03.02.2.03.0001.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		250 Orang	573.448.000	PIS		250 Orang	602.121.000
5.03.02.2.03.0002.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		1 Dokumen	252.953.000	PIS		1 Dokumen	265.601.000

5.03.02.2.03.000 3.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		1 Dokumen	156.616.000	PIS		1 Dokumen	164.447.000
5.03.02.2.03.000 4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		100 Orang	950.000.000	PIS		100 Orang	950.000.000
5.03.02.2.03.000 5.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		1 Dokumen	57.000.000	PIS		1 Dokumen	62.000.000
5.03.02.2.03.000 6.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan		100 Orang	81.635.000	PIS		100 Orang	85.717.000
5.03.02.2.03.000 8.	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		100 Orang	1.456.000.000	PIS		100 Orang	1.456.000.000
5.03.02.2.03.001 3.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina		100 Orang	18.138.000	PIS		100 Orang	19.045.000
5.03.02.2.03.001 4.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		100 Orang	52.712.000	PIS		100 Orang	55.348.000
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 BA	968.154.000	PIS		1 BA	1.055.563.000
5.03.02.2.04.000 1.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	170.000.000	PIS		1 Dokumen	185.000.000
5.03.02.2.04.000 2.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		12 Dokumen	153.540.000	PIS		12 Dokumen	161.217.000
5.03.02.2.04.000 4.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		9 Orang	102.939.000	PIS		9 Orang	108.086.000
5.03.02.2.04.000 5.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		100 Orang	350.000.000	PIS		100 Orang	400.000.000
5.03.02.2.04.000 7.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		73 Orang	90.776.000	PIS		73 Orang	95.315.000
5.03.02.2.04.000 8.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		12 Laporan	65.712.000	PIS		12 Laporan	68.998.000
5.03.02.2.04.000 9.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		12 Dokumen	35.187.000	PIS		12 Dokumen	36.947.000

5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.438.638.000				3.610.571.000
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit		126 Poin	3.438.638.000			127 Poin	3.610.571.000
5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		1 BA	217.516.000	PIS		1 BA	228.392.000
5.04.02.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		100 Orang	217.516.000	PIS		100 Orang	228.392.000
5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		1 BA	3.221.122.000	PIS		1 BA	3.382.179.000
5.04.02.2.02.0001.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun		1 Dokumen	87.767.000	PIS		1 Dokumen	92.156.000
5.04.02.2.02.0007.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1 Laporan	3.133.355.000	PIS		1 Laporan	3.290.023.000
JUMLAH					35.376.515.000				37.490.158.000

Sumber: Dokumen RENSTRA 2025-2029 BKPSDM Kabupaten Cirebon

BAB V

Penutup

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran secara detail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini merupakan perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun 2026 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan BKPSDM Kabupaten Cirebon. Dengan demikian Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan anggaran BKPSDM yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai misi dan visi organisasi.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Rencana Kerja BKPSDM, yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2026 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran BKPSDM Tahun 2026. RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.

3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BKPSDM Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2026 yang berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Diharapkan setelah disusunnya Rencana Kerja ini program kerja dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon akan lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Sumber, 28 Februari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

